

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

- Tahun Sidang : 2021-2022  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke- : 7  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Senin, 6 September 2021  
Waktu : 10.30 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta  
Acara : Membahas:  
1. RKA K/L Tahun 2022; dan  
2. Usulan Program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI.  
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan didampingi oleh Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG), G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra), dan Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)  
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)  
Hadir : A. 40 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:  
1. Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum. (Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);  
2. Dr. Muhammad Yusuf. S.H., M.M. (Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);  
3. Dr. Ir. Muhammad Zaini Hanafi, M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan);  
4. Dr. TB Haeru Rahayu (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan);  
5. Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc. (Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan);

6. Ir. Artati Widiarti, M.A. (Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
7. Laksma TNI Adin Nurawaluddin, M.Han. (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
8. Dr. Kusdiantoro, M.Sc. (Plt. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan); dan
9. Hari Maryadi (Kuasa Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan).

## I. PENDAHULUAN

RDP Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, membahas RKA K/L Tahun 2022 dan Usulan Program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA K/L Tahun 2022 sebesar **Rp6.115.967.397.000,00** (enam triliun seratus lima belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan RI Nomor S-634/MK.02/2021 dan 516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022.
2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai usulan anggaran tambahan Tahun 2022 Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar **Rp8.043.438.587.000,00** (delapan triliun empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
3. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai Pagu Indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 sebesar **Rp1.200.000.000.000,00** (satu triliun dua ratus miliar rupiah) dengan rincian:
  - a. DAK Provinsi sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan
  - b. DAK Kabupaten/Kota sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah).

4. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai usulan tambahan anggaran DAK Tahun 2022 bidang Kelautan dan Perikanan sebesar **Rp1.800.000.000.000,00** (satu triliun delapan ratus miliar rupiah).
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan perampingan kegiatan/komponen di setiap Eselon I agar lebih efektif dan efisien, sehingga kegiatan/komponen yang direncanakan akan lebih terasa dampaknya bagi kemanfaatan masyarakat.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen melaksanakan Bimtek/Sosialisasi kegiatan/komponen bantuan Pemerintah di setiap Eselon I pada Tahun 2022 bersama dengan Anggota Komisi IV DPR RI, dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi rakyat sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini.
7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera menyelesaikan petunjuk teknis bantuan Pemerintah selambat-lambatnya bulan November 2021 dan selanjutnya melaksanakan sosialisasi kepada Anggota Komisi IV DPR RI pada bulan Desember 2021, agar masyarakat dapat segera melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan, sehingga pada awal Tahun 2022 calon penerima dan calon lokasi (CPCL) sudah terverifikasi dengan lengkap dan bantuan terdistribusi dengan cepat kepada masyarakat.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen melakukan tahapan-tahapan dan pendekatan pencapaian target PNBK pada Tahun 2024 sebesar Rp12.000.000.000.000,00 (dua belas triliun rupiah), yang telah direncanakan dalam rangka optimalisasi peningkatan sumber devisa negara yang sangat dibutuhkan bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
9. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan pembangunan budi daya udang berbasis kawasan (*shrimp estate*) yang telah menjadi prioritas pada Tahun 2022, untuk meningkatkan ekspor dan devisa negara serta kemakmuran masyarakat Indonesia, khususnya pembudi daya ikan.
10. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menginventarisasi aset-aset yang ada di setiap Eselon I, termasuk aset Badan Riset Dan Sumberdaya Manusia Kelautan Perikanan yang beririsan dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan agar kedepan asetnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyiapkan Peraturan Menteri terkait dengan adanya revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, terutama di lingkup wilayah konservasi yang dilakukan di ekosistem perairan, dan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
12. Komisi IV DPR RI menyarankan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan kegiatan dan menyalurkan bantuan Pemerintah bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) seperti kegiatan Gemarikan, Bakti Nelayan, dan Bakti Mutu Karantina, dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat setempat.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.00 WIB.

Sekretaris Jenderal  
Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Ttd.

**Antam Novambar**

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Sudin, S.E.**  
A-151